

IMPLEMENTASI UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY  
CREDITS NOMOR 500 TAHUN 1993 (UCP 500) DAN INTERNATIONAL  
STANDBY PRACTICES TAHUN 1998 (ISP 98) TERHADAP PENGGUNAAN  
STANDBY L/C PADA PRAKTIK PERBANKAN INDONESIA  
(STUDI KASUS DI PT BANK NIAGA TBK)

Nartojo<sup>1</sup>, Prof. Emmy Pangaribuan, S.H.,<sup>2</sup> Roedjiono, S.H., L.L.M.<sup>3</sup>

Program Studi Magister Hukum Bisnis  
Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada

## INTISARI

Penelitian ini membahas masalah penerapan ketentuan UCP 500 dan ISP 98 dalam praktik penggunaan *Standby L/C* di bank-bank di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Untuk mendapatkan data primer dan sekunder, digunakan alat penelitian berupa wawancara dan studi kepustakaan. Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Terhadap istilah-istilah asing yang ditemukan dalam penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dicarikan padanan katanya dalam kamus yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai *Standby L/C* yang ada pada UCP 500 bersifat umum dan belum menyentuh seluruh aspek-aspek yuridis dari *Standby L/C*. Kekosongan hukum inilah yang kemudian *discovered* oleh ISP 98. Karena tidak adanya aturan yang mengharuskan pengguna *Standby L/C* untuk tunduk pada ketentuan ISP 98, para pelaku bisnis yang memakai *Standby L/C* sebagai jaminan pembayarannya dapat menggunakan UCP 500 atau ISP 98 atau kebiasaan atau pilihan hukum tertentu sebagai pedoman dalam bertransaksi dengan *Standby L/C*. Tidak adanya kesamaan pengaturan atas setiap penggunaan *Standby L/C* ini akhirnya menimbulkan perbedaan penafsiran di masyarakat.

Agar perbedaan penafsiran tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum yang kompleks dan memperlemah posisi tawar pengusaha lokal, perlu adanya kepastian mengenai dasar hukum bagi setiap penggunaan *Standby L/C* di Indonesia. Untuk itu, perlu adanya peningkatan sumber daya manusia dan sosialisasi aspek-aspek hukum dan bisnis yang terkandung di dalam ISP 98.

Kata kunci: Implementasi, UCP 500, ISP 98, *Standby L/C*.

---

<sup>1</sup> Advokad dan Pengacara, NAWIC & Partners Law Firm Jakarta

<sup>2</sup> Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

<sup>3</sup> Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

THE IMPLEMENTATION OF CUSTOMS AND PRACTICE  
FOR DOCUMENTARY CREDITS NUMBER 500 YEAR 1993 (UCP 500) AND  
INTERNATIONAL STANDBY PRACTICES YEAR 1998 (ISP 98)  
TOWARD THE IMPLEMENTATION OF STANDBY L/C  
IN INDONESIAN BANKING PRACTICES  
(CASE STUDY IN PT BANK NIAGA TBK)

Nartojo<sup>1</sup>, Prof. Emmy Pangaribuan, S.H.<sup>2</sup> Roedjiono, S.H., L.L.M.<sup>3</sup>

Study Program of Business Law Magistracy  
Post Graduate Program, Gadjah Mada University

Abstract

This research criticizes the implementation of UCP 500 and ISP 98 in Indonesian banking practices where Standby L/C is used. It is a juridical normative research. The secondary and the primary legal materials are obtained from library and field researches. The legal materials were analyzed by qualitative descriptive to have the conclusion as the answer of the problem by using deductive and inductive methods. Toward foreign terminology that found in library and field research, is found its correlation through related dictionaries.

The research indicates that articles of UCP 500 are too general and have not covered all legal aspects of Standby L/C yet. Therefore, it is covered by ISP 98. Because there is no regulation that can be used to force Standby L/C user to obey the ISP 98, businessman who use Standby L/C as their payment guarantee have options to choose whether UCP 500, ISP 98, customs or choice of law as their guidance for their transaction. The difference of law in every Standby L/C practicing finally brings an interpretation difference in society.

In order to prevent any legal issues turn up, so that they would not make bargaining position of local businessmen weak, it is need a certainty concerning basic regulation for any Standby L/C practicing in Indonesia. Therefore, it is need a human resources development and socialization of legal and business aspects of ISP 98.

Key words: Implementation, UCP 500, ISP 98, *Standby L/C*.

---

<sup>1</sup> Lawyer, NAWIC & Partners Law Firm, Jakarta.

<sup>2</sup> Business Law Magistracy of Gadjah Mada University, Yogyakarta.

<sup>3</sup> Business Law Magistracy of Gadjah Mada University, Yogyakarta.